

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR : 721 TAHUN 2016**

*TENTANG*

**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**FEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**



## **BUPATI DELI SERDANG**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 721 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

#### Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

#### Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan
- c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a ditentukan dengan kriteria meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang telah diserahkan untuk dikelola oleh Desa;
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- g. Program/kegiatan pihak ketiga yang telah diserahkan untuk dikelola oleh Desa diperoleh dari individu, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor dan perusahaan.

## Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan c diurus oleh Desa.

## Pasal 6

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai biaya.

## Pasal 7

Daftar jenis rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### **PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Daftar kewenangan desa yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

#### BAB IV

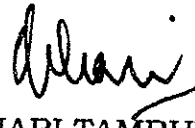
#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI DELI SERDANG,



ASHARI TAMBUNAN

- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 13 Mei 2016

**BUPATI DELI SERDANG,**

Dto

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. H. ASRIN NAIM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570827 198110 1 001.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016 NOMOR 025**

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang  
tentang Kewenangan Lokal  
Berskala Desa.

Nomor : 721 Tahun 2016

Tanggal : 13 Mei 2016

**DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**I. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :**

- A. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi.
  - a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. Pengelolaan/pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  - e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor tertentu sesuai jenis pekerjaan;
  - f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - i. Penetapan susunan organisasi Pemerintah Desa;
  - j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - k. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - l. Penetapan BUM Desa;
  - m. Penetapan APB Desa;
  - n. Penetapan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - o. Penetapan/penyelenggaraan kerja sama antar-Desa;
  - p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa milik desa;
  - q. Pendataan potensi Desa dan profil desa;
  - r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
  - s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
  - t. Pengelolaan arsip Desa; dan
  - u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
  - v. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - w. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
  - x. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - y. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan
  - z. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

**B. Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**

- Melakukan pelayanan administrasi pengantar untuk pembuatan Kartu KTP dan Kartu Keluarga;
- Fasilitasi Pengadaan Alat Perekaman Penduduk di Desa;
- Menerbitkan Surat Pengantar Untuk Penerbitan Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Menyelenggarakan Pendataan Dan Pembinaan Dokumen Kependudukan;
- Registrasi Penduduk Menurut Tingkat Mutasi Penduduk;
- Registrasi Penduduk Menurut Kelompok Umur;
- Registrasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan;
- Registrasi Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencarian;
- Registrasi Penduduk Menurut Rata-Rata Jumlah Data Keluarga;
- Registrasi Penduduk Menurut Besarnya Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih;
- Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah, Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keterangan Atau Ganti Rugi Atas Tanah;
- Menyaksikan Pengalihan Dan Mengetahui Surat Pengalihan Atas Tanah Dengan Ganti Kerugian;
- Mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Atas Tanah;
- Fasilitasi Penyelenggaraan, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah;
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- Mengawasi Pemeliharaan Dan Pengelolaan Saluran Untuk Pertanian Sawah Dan Budi Daya Perikanan;
- Mengawasi Pengaturan Pemanfaatan Air Pada Tingkat Usaha Tani;
- Sosialisasi Penggunaan Alsintan;
- Sosialisasi Pupuk Organik;
- Fasilitasi Sosialisasi Benih;
- Fasilitasi Benih Unggul;
- Membina Pengembangan Lumbung Desa;
- Fasilitasi Penyediaan Informasi Usaha Tani;
- Kerjasama Dalam Mengawasi Pencemaran Industri;
- Mengawasi Pengambilan Hasil Hutan Melalui Penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- Mengawasi pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan ilegal fishing;
- Membina koperasi;
- Pengawasan usaha koperasi;
- Mengawasi pengelolaan dana UED-SP;
- Menyelenggarakan pendataan tenaga asing;
- Menyelenggarakan pendataan anggota serikat buruh/serikat pekerja ditingkat perusahaan;
- Mengawasi pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan pompanisasi;
- Membina dan mengawasi proyek air bersih desa;
- Mengawasi empang/telaga yang sudah di kontruksi;
- Mengawasi tertib pemanfaatan jalan desa;
- Membina P3A;

- Fasilitasi pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- Fasilitasi kegiatan validasi (penerbitan, pembetulan, keberatan) PBB-P2;
- Fasilitasi penyuluhan pajak daerah;
- Menghimbau wajib pajak untuk membayar PBB-P2;
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Aset Desa;
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah;
- Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pemetaan Daerah Rawan Bencana Wilayah Desa;
- Pendataan Korban Bencana;
- Penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- Pembuatan plang/baliho himbauan pembayaran Pajak Daerah ditingkat Desa dan Dusun.

## **II. Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :**

### **A. Pelayanan dasar Desa :**

#### **1) Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :**

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - layanan gizi untuk balita;
  - pemeriksaan ibu hamil;
  - pemberian makanan tambahan;
  - penyuluhan kesehatan;
  - gerakan hidup bersih dan sehat;
  - penimbangan bayi; dan
  - gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

#### **2) Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**

- a. Fasilitasi penyuluhan pencegahan penyakit menular.
- b. Fasilitasi penyuluhan, pelaksanaan pemberian makan tambahan.
- c. Membina kelompok pelaku budidaya tanaman obat keluarga.
- d. Fasilitasi upaya promosi kesehatan.

### **B. Sarana dan Prasarana Desa :**

#### **1) Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :**

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- f. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- k. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- m. Pengelolaan pemakaman Desa;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- o. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan tanah lapangan milik Desa;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- s. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- t. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

**2) Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**

- a. Pembukaan Jalan Perdesaan Berskala Lokal Desa;
- b. Perkerasan Jalan Perdesaan Berskala Lokal Desa;
- c. Rigid Beton Perdesaan Berskala Lokal Desa;
- d. Pembuatan Plat Beton Perdesaan Berskala Lokal Desa;
- e. Pemasangan gorong-gorong/box culvert Perdesaan Berskala Lokal Desa;
- f. Pekerjaan Saluran Tanah/Pasangan pada Jalan Perdesaan;
- g. Pekerjaan tembok penahan/beronjong/turap;
- h. Pembuatan Pelang Nama Jalan Desa dan Nomor Rumah; Pembuatan Pelang Sapta Pesona menuju Destinasi Pariwisata;
- i. Pembangunan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- j. Pelaksanaan Pos Simpul Koordinasi (Posko) Pertanian di Tingkat Desa.

**C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa :**

**1) Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :**

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- d. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- e. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- f. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- g. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- h. Pengembangan benih lokal;

- i. Pengembangan ternak secara kolektif;
- j. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. Pembentukan/pendirian, pengelolaan, pengembangan dan penguatan permodalan BUM Desa;
- l. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- m. Pengelolaan padang gembala;
- n. Pengembangan wisata Desa yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten/ dan atau Provinsi;
- o. Pengelolaan balai benih ikan;
- p. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta peternakan; dan
- q. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- r. Penggilingan padi.
- s. Pengelolaan kapal penangkap ikan.

- 2) **Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**
  - a. Pengembangan/Pengelolaan Agribisnis di Tingkat Desa.

#### **D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa :**

- 1) **Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :**
  - a. Penghijauan;
  - b. Pemeliharaan Hutan Bakau;
  - c. Perlindungan Mata Air;
  - d. Pembersihan Daerah Aliran Sungai;
  - e. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2). **Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**
  - a. Pelaksanaan benah dusun bangun desa dalam rangka mewujudkan Deli Serdang berseri;
  - b. Menyelenggarakan penghijauan dan konservasi tanah;
  - c. Menyelenggarakan penghijauan dan pelestarian hutan.

#### **III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :**

- 1) **Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :**
  - a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
  - b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
  - c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
  - d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
  - e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - g. Pembinaan lembaga adat;
  - h. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
  - i. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  - j. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

**2) Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**

- a. Pembinaan Lembaga-Lembaga Budaya;
- b. Pesta Rebu-Rebu;
- c. Suroan/Bersih Desa;
- d. Pesta Lemang;
- e. Kenduri Nelayan;
- f. Pendataan Situs Cagar Budaya;
- g. Pelestarian Catur Karo;
- h. Fasilitasi Busana Daerah;
- i. Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Nasional di Desa;
- j. Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan di Desa;
- k. Membina pelaksanaan program Keamanan, ketentraman, ketertiban, kebersihan dan kesejukan;
- l. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- m. Fasilitasi pembinaan sosialisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan pemuda;
- n. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni untuk keluarga yang tidak mampu;
- o. Fasilitasi penanganan masyarakat yang tertimpa bencana alam;
- p. Membina Keluarga Sadar Hukum;
- q. Mengawasi/mengendalikan Pedagang yang berjualan ditempat-tempat yang bukan diperuntukan sebagai tempat berjualan;
- r. Menyelenggarakan Pendataan 26 PMKS;
- s. Membina Karang Taruna;
- t. Mengawasi Pengawasan Program Keluarga Harapan;
- u. Membentuk Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- v. Fasilitasi Penyandang Cacat;
- w. Membina Pekerja Sosial Masyarakat;
- x. Fasilitasi Orang Terlantar;
- y. Fasilitasi Lansia Terlantar.

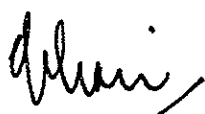
**IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :**

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meliputi :
  - a. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
    1. Kelompok tani;
    2. Kelompok nelayan;
    3. Kelompok seni budaya; dan
    4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
  - c. Fasilitasi pendataan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan disabilitas sosial;
  - d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - e. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
  - f. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - g. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. Peningkatan kapasitas dan pelatihan usaha ekonomi Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- i. Pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
  - j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
    1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. Kelompok perempuan;
    4. Kelompok tani;
    5. Kelompok masyarakat miskin;
    6. Kelompok nelayan;
    7. Kelompok pengrajin;
    8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    9. Kelompok pemuda, Karang Taruna dan Pramuka;
    10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- 2) **Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**
- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Darwis) di daerah tujuan wisata
  - Penyuluhan Sapta Pesona di daerah tujuan wisata.
  - Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
  - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
  - Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
  - Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
  - Pembinaan Kader Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KPPKS)
  - Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) berbasis masyarakat
  - ⊖ Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana ✓
  - Pembinaan Kelompok Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
  - Membina kelompok-kelompok nelayan.
  - Membina kelompok-kelompok peternakan.
  - Kerjasama membina/mengadakan pelatihan dan mengembangkan usaha ketrampilan masyarakat dan pengrajin.
  - Koordinasi pemasaran hasil industri kerajinan rakyat.
  - Membina kelompok-kelompok komunikasi sosial
  - Dukungan pelaksanaan Program P2W-KSS
  - Pembinaan dan pengawasan UP2K PKK
  - Pelatihan TPK3 PKK dan Pelatihan lain bagi Kader PKK
  - Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh.
  - Pembinaan Kelompok Relawan Peduli Bencana
  - Penyuluhan Pengurangan Resiko Bencana.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI DELI SERDANG,

  
ASHARI TAMBUNAN

- i. Pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. Kelompok perempuan;
  4. Kelompok tani;
  5. Kelompok masyarakat miskin;
  6. Kelompok nelayan;
  7. Kelompok pengrajin;
  8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. Kelompok pemuda, Karang Taruna dan Pramuka;
  10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**2) Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten antara lain :**

- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Darwis) di daerah tujuan wisata;
- Penyuluhan Sapta Pesona di daerah tujuan wisata;
- Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
- Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- Pembinaan Kader Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KPPKS);
- Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) berbasis masyarakat;
- Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana;
- Pembinaan Kelompok Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT);
- Membina kelompok-kelompok nelayan;
- Membina kelompok-kelompok peternakan;
- Kerjasama membina/mengadakan pelatihan dan mengembangkan usaha ketrampilan masyarakat dan pengrajin;
- Koordinasi pemasaran hasil industri kerajinan rakyat;
- Membina kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- Dukungan pelaksanaan Program P2W-KSS;
- Pembinaan dan pengawasan UP2K PKK;
- Pelatihan TPK3 PKK dan Pelatihan lain bagi Kader PKK;
- Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh;
- Pembinaan Kelompok Relawan Peduli Bencana;
- Penyuluhan Pengurangan Resiko Bencana.

**BUPATI DELI SERDANG,**

**Dto**

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

  
**Drs. H. ASRIN NAIM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570827 198110 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016 NOMOR 025**

Lampiran II : Peraturan Bupati Deli Serdang  
tentang Kewenangan Lokal  
Berskala Desa.

Nomor : 72/ Tahun 2016

Tanggal : 13 Mei 2016

**FORMAT BERITA ACARA :**

**KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**TENTANG**

**HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di Balai Desa ..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Deli Serdang yang dapat dilaksanakan di Desa ..... berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor.....Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Deli Serdang, dengan kegiatan sebagai berikut :

**A. Materi Rapat**

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor ..... tanggal ..... tentang..... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

**B. Keputusan Rapat**

Rincian Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa ....., adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA DI DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

**a. bidang pemerintahan Desa :**

1. .... \*
2. .... \*
3. dst

**b. pembangunan Desa :**

1. .... \*
2. .... \*
3. dst.

c. kemasyarakatan Desa :

1. .... \*
2. .... \*
3. dst.

d. pemberdayaan masyarakat Desa :

1. .... \*
2. .... \*
3. dst.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa ..... dan BPD ..... terhadap kesiapan desa ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Deli Serdang yang pengaturannya diserahkan kepada Desa ..... kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD ..... sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ..... 20.....

KETUA BPD .....

KEPALA DESA .....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

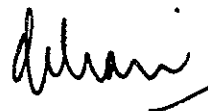
.....

.....

dst

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI DELI SERDANG,



ASHARI TAMBUNAN

Keterangan : \*)  
Rincian kewenangan Terpilih  
Berdasarkan Hasil Rapat

c. kemasyarakatan Desa :

1. .... \*
2. .... \*
3. dst.

d. pemberdayaan masyarakat Desa :

1. .... \*
2. .... \*
3. dst.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa ..... dan BPD ..... terhadap kesiapan desa ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Deli Serdang yang pengaturannya diserahkan kepada Desa ..... kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD ..... sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ..... 20.....

KETUA BPD .....,

KEPALA DESA .....,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....  
.....

Dst

Keterangan : \*)

Rincian kewenangan Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat



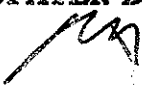
**BUPATI DELI SERDANG,**

**Dto**

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

  
**Drs. H. ASRIN NAIM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570827 198110 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016 NOMOR 025**